



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022

TAHUN 2023



**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PAYAKUMBUH**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun sebagai salah satu instrument dalam upaya untuk mewujudkan Pembangunan yang tepat sasaran dan terukur di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dan sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada umumnya. Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahun pertama periode 2018-2022 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis juga memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Kinerja Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna. Dengan demikian Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sangat mengharapkan adanya kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh.



Payakumbuh, Desember 2022

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh

YUNIDA FATWA, S.Sos,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670601 198809 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Aspek Strategi Organisasi	2
1.3 Isu Strategis	31
1.5 Landasan Hukum	31
1.6 Sistematika	32
BAB II PERENCANAAN KINERJA	34
2.1 Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017- 2022	34
2.2 Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	35
2.3 Indikator Kinerja Utama	41
2.4 Perjanjian Kinerja 2022	47
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	52
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	52
3.2 Analisis Capaian Kinerja	54
3.2 Realisasi Anggaran	83
3.3 Prestasi dan Penghargaan	97
BAB IV PENUTUP	100
4.1 Kesimpulan	
4.2 Permasalahan	
4.3 Tindak Lanjut	
LAMPIRAN	
1) Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
2) RKT Tahun 2022	
3) SK IKU Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2027-2022	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Berdasarkan Pangkat/Golongan	3
Tabel 1.2	: Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Berdasarkan Pendidikan	4
Tabel 1.3	: Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	26
Tabel 1.4	: Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	27
Tabel 1.5	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	30
Tabel 2.1	: Sebelum Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	37
Tabel 2.2	: Sesudah Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	38
Tabel 2.3	: Sebelum Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	39
Tabel 2.4	: Sesudah Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	40
Tabel 2.5	: Sebelum Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	43
Tabel 2.6	: Sesudah Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	44
Tabel 2.7	: Sebelum Perubahan Formula Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	45

Tabel 2.8	: Sesudah Perubahan Formula Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	46
Tabel 2.9	: Sesudah Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022	47
Tabel 2.10	: Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis	48
Tabel 3.1	: Skala Pengukuran Kinerja	52
Tabel 3.2	: Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2022	53
Tabel 3.3	: Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2022	55
Tabel 3.4	: Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2020-2022	63
Tabel 3.5	: Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja dengan Target Akhir 2022	63
Tabel 3.6	: Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Tahun 2022 .	65
Tabel 3.7	: Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Tahun 2022	67
Tabel 3.8	: Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan	69
Tabel 3.9	: Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2022	70
Tabel 3.10	: Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2020-2022	79
Tabel 3.11	: Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja dengan Target Akhir 2022	80
Tabel 3.12	: Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Tahun 2022 ..	83
Tabel 3.13	: Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Tahun 2022	84
Tabel 3.14	: Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan	85
Tabel 3.15	: Data Perkembangan Usaha Industri Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022	87
Tabel 3.16	: Jumlah Usaha Industri Berdasarkan Klasifikasi Usaha .	88
Tabel 3.17	: Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2022	90
Tabel 3.18	: Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2020-2022	91
Tabel 3.19	: Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja dengan Target Tahun 2022	91
Tabel 3.20	: Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Tahun 2022	92

Tabel 3.21	: Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan	93
Tabel 3.22	: Akuntabilitas Keuangan Tahun 2022	95
Tabel 3.23	: Akuntabilitas Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	100

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	: PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan	4
Grafik 1.2	: PNS Berdasarkan Pendidikan	5
Grafik 3.1	: Penyerapan Tenaga Kerja	56
Grafik 3.2	: Jumlah Usaha Industri Berdasarkan Klasifikasi Usaha .	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan Negara.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah wajib menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang mendasari pada perencanaan dan hasil pada ketetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Demikian halnya dengan SKPD diharuskan untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dimuat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah Negara, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh. Hal tersebut di mulai dengan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra).

Dalam rangka menghasilkan data yang berkualitas, tepat waktu dan akuntabel. Tahun 2022 merupakan tahun kelima pelaksanaan Perubahan Renstra Tahun 2017-2022. Renstra mengalami pengembangan

yang disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan. Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan diikuti oleh penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2022 disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran yang digunakan serta pencapaian tujuan, sasaran-sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dan Perubahan Renstra Tahun 2017-2022.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2022 dengan harapan :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat kerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.
2. Mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Aspek Strategi Organisasi

Aspek strategis organisasi yang berpengaruh kepada peran dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1.2.1. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)

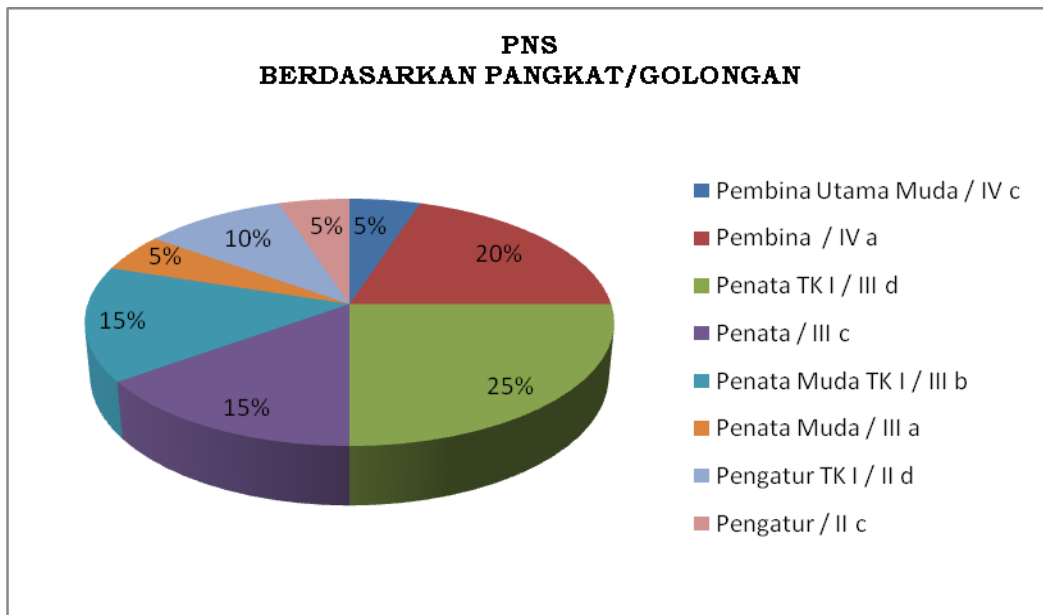
Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh pada Tahun 2022 sebanyak 20 (Dua

puluh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 8 (Delapan) orang laki-laki dan 12 (Dua belas) orang perempuan dengan status kepegawaian dan strata/jenjang pendidikan mulai dari SMA hingga S-2. Berikut data kepegawaian seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Pangkat/Gol	Sekretariat		Bidang Tenaga Kerja		Bidang Perindustrian		UPTD		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
PembinaUtama Muda / IV c		1								1	1
Pembina /IV a	1			2	1				2	2	4
PenataTK I /IIIId		2		1	2				2	3	5
Penata/IIIc			1	1			1		2	1	3
PenataMudaTK I/ IIIb		1				1	1		1	2	3
PenataMuda/IIIa		1								1	1
Pengatur TK I /IId	1	1							1	1	2
Pengatur /IId		1								1	1
Jumlah	2	7	1	4	3	1	2	-	8	12	20

Grafik. 1.1



Tabel 1.2

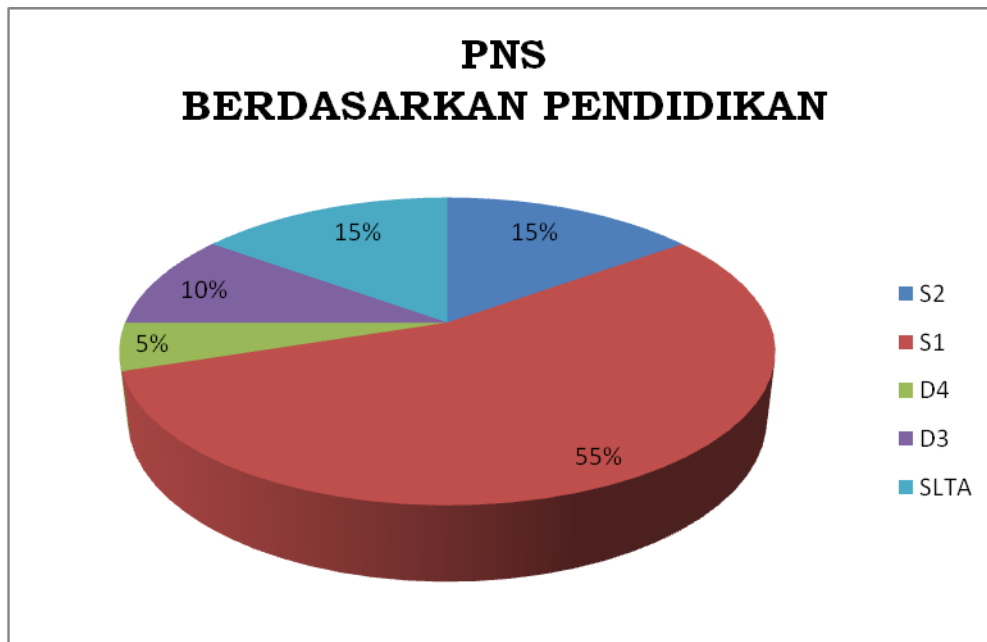
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Pendidikan

Dinas Tenaga Kerjadan Perindustrian Kota Payakumbuh

Pendidikan	Sekretariat		Bidang Tenaga Kerja		Bidang Perindustrian		UPTD P3R		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
S2		1			1		1		2	1	3
S1	1	2	1	4	2	1			4	7	11
D4		1								1	1
D3		1					1		1	1	2
SLTA	1	2							1	2	3
Jumlah	2	7	1	4	3	1	2	-	8	12	20

Grafik 1.2



1.2.2 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

1) Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh merupakan unsur pelaksana bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian dipimpin Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Tenaga Kerja
4. Bidang Perindustrian
5. UPTD P3R

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh diatur dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Perindustrian;
- Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Perindustrian;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Perindustrian;
- Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Perindustrian; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota

Payakumbuh, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok :

Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Fungsi :

- a. Perumusankebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretaris Dinas

Tugas :

Merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasidan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

- a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas;

- e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Uraian Tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat;
- b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian;
- c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Menganalisa kebutuhan, melaksanakan pengadaa, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasaran di lingkungan Dinas agar efektif dan efisien;
- e. Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas yang berlaku;
- f. Melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler lingkup Dinas;
- h. Menganalisa kebutuhan personel untuk masing-masing bidang dan melakukan pengurusan administrasi kepegawaian personel lingkup Dinas;
- i. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di sub bagian;
- j. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;

- k. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - o. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bagian Program dan Keuangan
- Uraian Tugas :
- a. Menghimpun dan menyusun rencana kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Dinas;
 - c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 - d. Menghimpun dan menyusun setiap bidang dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya;

- e. Menghimpun, memadurasi dan menyusun bahan program, kegiatan serta anggaran dari masing-masing bidang;
- f. Menghimpun, menyusun dan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di sub bagian;
- g. Menghimpun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dari setiap bidang;
- h. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- i. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Panjar, Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang, Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang dan Surat Perintah Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- j. Menyiapkan Surat Perintah Mebayar lingkup Dinas;
- k. Menyelenggarakan pembuatan daftar gaji, tunjangan, honor, uang lembur, biaya perjalanan Dinas dan kesejahteraan pegawai;
- l. Mengoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran Dinas;
- m. Menyelenggarakan verifikasi, pertanggungjawaban keuangan akutansi dan pelaporan;
- n. Melaksanakan pembinaan terhadap bendahara penerimaan dan pengeluaran serta personel pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
- o. Menyiapkan bahan serta memfasilitasi kegiatan pengawasan oleh fungsional pengawas;

- p. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- q. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- s. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- t. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Tenaga Kerja

Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang Tenaga Kerja.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang Tenaga Kerja;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang Tenaga Kerja;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Tenaga Kerja;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang Tenaga Kerja;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Tenaga Kerja terdiri atas 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi, yaitu :

1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelatihan Tenaga Kerja

Uraian Tugas :

- a. Menyusun Rencana Kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
- b. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
- c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Melaksanakan sosialisasi program dan kegiatan pelatihan;
- e. Melakukan koordinasi dengan BLK dan lembaga pelatihan lainnya;
- f. Menyusun rencana dan kegiatan pemagangan melaksanakan seleksi terhadap peserta pemagangan;
- g. Melakukan pembinaan organisasi, memberikan perizinan dan rekomendasi kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- h. Melakukan pendataan dan pemantauan pekerjaan yang dilakukan peserta pasca pelatihan dan pemagangan;
- i. Melakukan pendataan dan pemantauan hasil pelatihan dan pemagangan yang dilaksanakan Balai Latihan Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- j. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
- k. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;

- l. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - m. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
 - n. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - p. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - q. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
- Uraian Tugas :
- a. Menyusun Rencana Kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
 - b. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
 - c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 - d. Menyiapkan bahan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sesuai lingkup tugasnya;

- e. Melakukan pendataan dan pelayanan pembuatan AK I sampai dengan AK V;
- f. Menyusun laporan dan informasi Pencari Kerja;
- g. Melaksanakan bimbingan kewirausahaan dan tenaga kerja swasta;
- h. Menyusun data dan naskah informasi lowongan kerja dalam dan luar negeri;
- i. Menyebarluaskan informasi lowongan kerja;
- j. Memproses permintaan tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri;
- k. Melaksanakan seleksi dan pelayanan administrasi terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia;
- l. Merancang dan memfasilitasi penempatan tenaga kerja luar provinsi/luar negeri;
- m. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bursa kerja dan penempatan tenaga kerja;
- n. Melaksanakan kegiatan padat karya produktif/infrastruktur;
- o. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
- p. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
- q. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- r. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
- s. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- t. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- u. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

- v. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
 - w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
- Uraian Tugas :
- a. Menyusun Rencana Kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
 - b. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
 - c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 - d. Menyiapkan bahan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sesuai lingkup tugasnya;
 - e. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja;
 - f. Melakukan pembinaan terhadap organisasi Pekerja/Serikat Pekerja dan Serikat Buruh dan melakukan pencatatan pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 - g. Melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap organisasi Pengusaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Lembaga Kerjasama BIPARTIT dan Lembaga Kerjasama TRIPARTIT;
 - h. Melakukan pembinaan dan pengesahan serta pemeriksaan berkala tentang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Wajib Laport Ketenagakerjaan;

- i. Memfasilitasi setiap tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial, melalui mediasi, arbitrase, konsiliasi dan pengadilan hubungan industrial;
- j. Memfasilitasi setiap permasalahan berkaitan dengan unjuk rasa, mogok kerja dan pemutusan hubungan kerja;
- k. Melakukan pembinaan berkaitan dengan sarana hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- l. Memfasilitasi orang terlantar dalam perjalanan antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi;
- m. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
- n. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
- o. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- p. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
- q. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- s. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- t. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perindustrian

Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang Perindustrian.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang Industri;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang Industri;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Industri;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang Industri;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Perindustrian terdiri atas 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi, yaitu:

1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Industri Pangan

Uraian Tugas :

- a. Menyusun Rencana Kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
- b. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
- c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Membantu koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan industri;
- e. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri pangan;

- f. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri pangan;
- g. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri pangan dan peran serta masyarakat;
- h. Membantu koordinasi dengan stakeholder terkait Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri yang lokasinya di Kota Payakumbuh untuk industri pangan;
- i. Memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Izin Usaha Industri kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- j. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Industri kewenangan Kabupaten/Kota;
- k. Membantu koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri pangan;
- l. Menyediakan informasi industri untuk Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri kewenangan Kabupaten/Kota;
- m. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data Sistem Informasi Industri Nasional;
- n. Membantu diseminasi dan publikasi data informasi industri Kabupaten/Kota;
- o. Membantu koordinasi pembinaan pengembangan, promosi dan pemasaran produk-produk industri pangan;
- p. Memfasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk industri pangan;
- q. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembangunan industri pangan;

- r. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
 - s. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - t. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - u. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
 - v. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - w. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - x. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - y. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
 - z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Industri Sandang dan Kerajinan
- Uraian Tugas :
- a. Menyusun Rencana Kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
 - b. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
 - c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

- d. Membantu koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan industri sandang dan kerajinan;
- e. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri sandang dan kerajinan;
- f. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri;
- g. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri sandang dan kerajinan dan peran serta masyarakat;
- h. Membantu koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri sandang dan kerajinan;
- i. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data Sistem Informasi Industri Nasional;
- j. Membantu koordinasi dengan stakeholder terkait Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri yang lokasinya di Kota Payakumbuh untuk industri sandang dan kerajinan;
- k. Memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Izin Usaha Industri kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- l. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Industri kewenangan Kabupaten/Kota;
- m. Menyediakan informasi industri untuk Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan

- Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri kewenangan Kabupaten/Kota;
- n. Membantu diseminasi dan publikasi data informasi industri Kabupaten/Kota;
 - o. Membantu koordinasi pembinaan pengembangan, promosi dan pemasaran produk-produk industri sandang dan kerajinan;
 - p. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana bagi industri sandang dan kerajinan;
 - q. Memfasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk industri sandang dan kerajinan;
 - r. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
 - s. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - t. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - u. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
 - v. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - w. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - x. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - y. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
 - z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Industri Logam, Elektronika, Kimia dan Bahan Bangunan

Uraian Tugas:

- a. Menyusun Rencana Kerja Sub Substansi sesuai dengan rencana kerja Bidang;
- b. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Substansi;
- c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Membantu koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
- e. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
- f. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
- g. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan dan peran serta masyarakat;
- h. Menyelenggarakan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan, pedoman dan dampak lingkungan dari hasil industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
- i. Membantu koordinasi dengan stakeholder terkait Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri

yang lokasinya di Kota Payakumbuh untuk industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;

- j. Memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Izin Usaha Industri kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- k. Mengoordinasi dan menyinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Industri kewenangan Kabupaten/Kota;
- l. Membantu koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
- m. Menyediakan informasi industri untuk Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri kewenangan Kabupaten/Kota;
- n. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisa data Sistem Informasi Industri Nasional;
- o. Membantu diseminasi dan publikasi data informasi industri Kabupaten/Kota;
- p. Membantu koordinasi pembinaan pengembangan, promosi dan pemasaran produk-produk industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
- q. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana bagi industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
- r. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembangunan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
- s. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan terkait pembinaan industri logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan;
- t. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
- u. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;

- v. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - w. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
 - x. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - y. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - z. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - aa. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
 - bb. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R)
- Tugas :
- Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dibidang Pelayanan dan Pengembangan Rendang.
- Fungsi :
- a. Penggerakan pembangunan Industri Kecil dan Menengah;
 - b. Penggerakan peran serta dan pemberdayaan IKM;
 - c. Pelaksanaan Pelayanan dan Pengembangan Rendang di Kota Payakumbuh.

UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R) mempunyai :

1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Tugas :

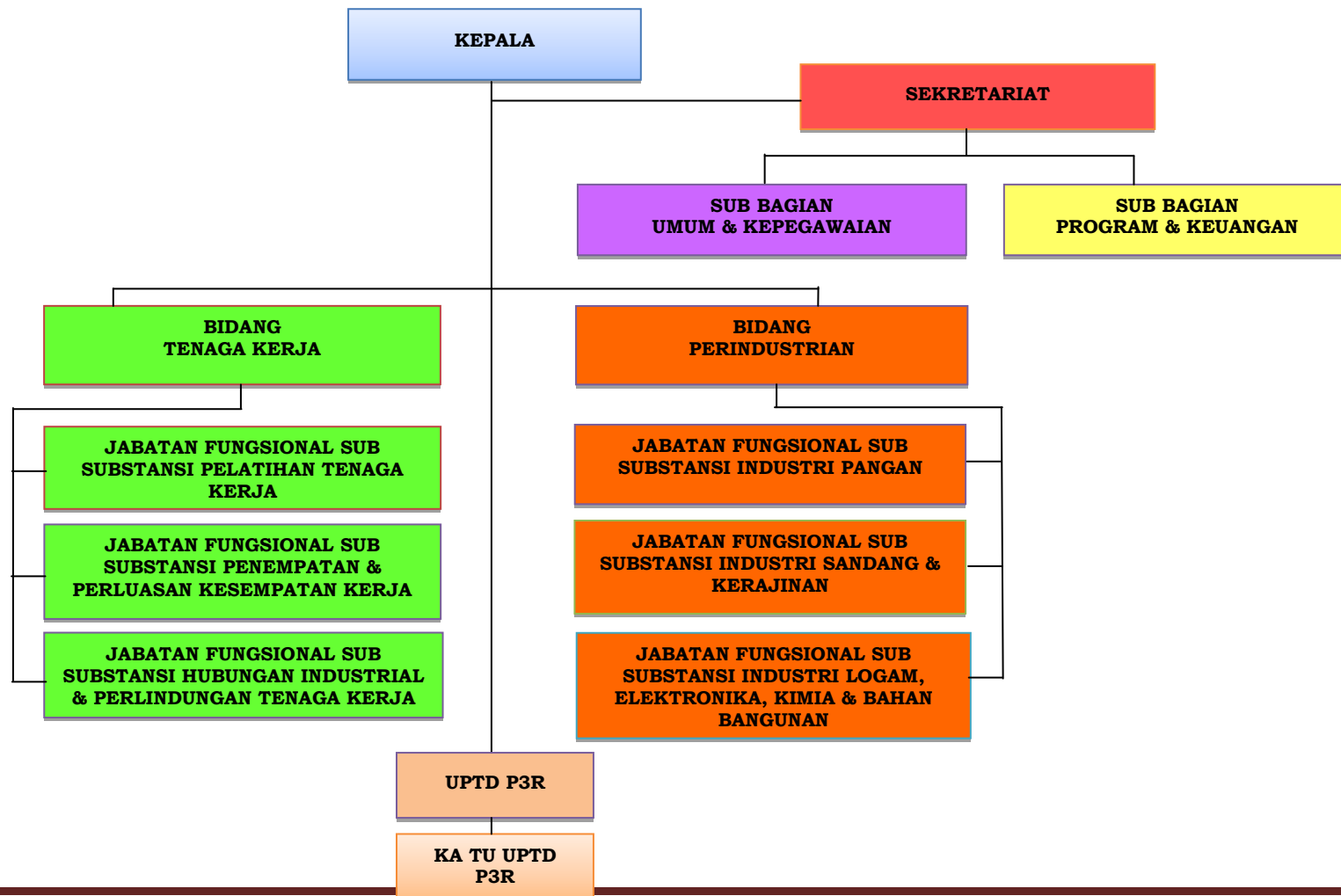
Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan umum meliputi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Fungsi :

- a. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat;
- b. Menyusun dan mengelola administrasi pelayanan seperti SOP, Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Survey Kepuasan Masyarakat dan Mekanisme Pengaduan;
- c. Mengelola administrasi umum dan kearsipan meliputi pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat;
- d. Mengelola administrasi kepegawaian;
- e. Mengelola administrasi keuangan;
- f. Mengelola administrasi inventaris Barang dan Asset Milik Daerah;
- g. Menyusun laporan kegiatan dibidang tugasnya;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3
 STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH



1.2.3 Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2022 didukung dengan aspek sarana dan prasarana yang dimiliki dapat dilihat pada tabelberikut ini :

Tabe 1.4
Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
KotaPayakumbuh

No	JenisBarang	Jumlah	Keterangan	Kondisi Asset (Baik/Rusak)
1	Gedung	1	Dinas UPTD Sentra Rendang	Baik
2	Kendaraan Dinas Roda 4	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
3	Kendaraan Dinas Roda 2	11	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	9 Baik/2 Rusak Ringan
4	Mesin Absen	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
5	Filling Kabinet Besi	6	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik/5 Berat Ringan
6	CCTV	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
7	Papan visual/papan	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
8	Papan Tulis	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
9	LCD Projektor/Infocus	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik/ Rusak Berat
10	Papan Gambar	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
11	Lemari Kayu	11	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2 Baik/9 Rusak Ringan
12	Kursi Besi/Metal	23	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik

No	JenisBarang	Jumlah	Keterangan	Kondisi Asset (Baik/Rusak)
13	MejaRapat	3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
14	MejaResepsionis	3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
15	Kursi Tamu	9	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	5 Baik/4 Rusak Ringan
16	Kursi Putar	14	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	11 Baik/3 Rusak Ringan
17	Kursi Biasa	7	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Baik/3 Rusak Ringan
18	Meja Kumputer	3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Rusak Berat
19	Meja ½ Biro	21	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1 Baik/20 Rusak Ringan
20	Lemari Es	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
21	AC	8	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	6 Baik/2 Rusak Ringan
22	Televisi	5	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Baik/1 Rusak Ringan
23	Sound System	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
24	Wireless	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
25	Kamera Video	12	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
26	Handy Cam	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Rusak Berat
27	Karpet	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
28	Hidran Kebakaran	4	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
29	P.C Unit	16	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	7 Baik/9 Rusak Ringan

No	JenisBarang	Jumlah	Keterangan	Kondisi Asset (Baik/Rusak)
30	Laptop	4	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2 Baik/2 Rusak Ringan
31	Note Book	5	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
32	Hard Disk	5	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3 Baik/2 Rusak Ringan
33	Printer	17	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	8 Baik/6 Rusak Ringan/3
34	Scanner	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
35	External/Portable Hardisk	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Rusak Berat
36	Meja Kerja Pejabat eselon II, III, IV	10	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4 Baik/6 Rusak
37	Kursi Kerja Pejabat eselon II,	2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
38	Kursi Tamu	9	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	5 Baik/4 Rusak
39	Kamera Digital	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Rusak Berat
40	Digital LED Running Text	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
41	Sofa	4	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Baik
42	Camera Film	1	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Rusak Ringan

1.2.3. Anggaran/Pembiayaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh didukung oleh anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh. Alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.5
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022
 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Operasi	4.438.624.030,-	4.707.847.141,-	269.223.111,-
5.1.01	Belanja Pegawai	2.536.215.772,-	2.372.480.665,-	(163.735.107,-)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.902.408.258,-	2.335.366.476,-	432.958.218,-
5.2	Belanja Modal		27.255.000,-	27.255.000,-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		27.255.000,-	27.255.000,-
	Jumlah Belanja	4.438.624.030,-	4.735.102.141,-	296.478.111
	Total Surplus/ Defisit	(4.438.624.030,-)	(4.735.102.141,-)	(296.478.111)

1.3. Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Dengan adanya pandemi covid 19, tidak hanya masalah kesehatan yang dihadapi, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak, termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak belakunya pembatasan aktifitas, termasuk perekonomian. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih mengalami kontraksi sampai Tahun 2022. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan, tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga terdampak dengan adanya pandemi covid 19.

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama 5 tahun. Identifikasi isu strategis urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian sebagai berikut :

1. Masih rendahnya serapan tenaga kerja;
2. Masih rendahnya produksi industri pengolahan.

1.4. Landasan Hukum

LKjIP Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

1.5. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Isu Strategis) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perubahan Rencana Strategis OPD Tahun 2017-2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan mempedomani dokumen perencanaan (Sebelum direviu dan setelah direviu).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
8. Seluruh capaian kinerja agar dilengkapi dengan dokumen foto.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan sasaran strategis dan persentase capaian kinerja keuangan organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Capaian Prestasi dan Penghargaan

Capaian prestasi dan penghargaan dilengkapi dengan dokumen foto dan penjelasan mengenai prestasi dan penghargaan yang diterima.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022

2.1.1. Visi dan Misi

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Adapun Visi Kota Payakumbuh :

“Payakumbuh Maju, Sejahtera, dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang”

Untuk merealisasikan Visi yang telah ditetapkan yang bertumpu pada potensi sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional dari seluruh pemangku kepentingan, maka Misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang handal, sehat dan kompetitif.
- Misi 2 : Membangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan gerakan ekonomi bersama.
- Misi 3 : Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan.
- Misi 4 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
- Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya berdasarkan adat basandi syara' syara' basandi kitabullah.

Dengan memperhatikan penjabaran Misi Walikota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan Misi 1 dan Misi 2.

2.2. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, maka Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh juga melakukan perubahan yg disesuaikan dengan perubahan sasaran dan indikator pada urusan tenaga kerja dan perindustrian. Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh serta berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

2.2.1. Visi dan Misi

Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Payakumbuh dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang. Visi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh 2017-2022 adalah

***“Terwujudnya Tenaga Kerja dan IKM Yang Produktif,
Terampil dan Berdaya Saing Menuju Payakumbuh Maju*”**

Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kualitas tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan daya saing.

- b. Meningkatkan daya saing produk IKM dalam menghadapi dinamika dan kompetensi pasar global.

2.2.2. Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya maka isu-isu strategis yang ada dibidang tenaga kerja dan perindustrian sebagai berikut :

1. Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja;
2. Masih rendahnya produksi industri pengolahan.

2.2.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 – 5 tahun. Penetapan tujuan dan Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang tenaga kerja dan perindustrian Kota Payakumbuh. Adapun rumusan tujuan di perencanaan Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah :

1. Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Meningkatnya produktivitas sektor industri.

Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja;
2. Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
 Sebelum Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
 Kota Payakumbuh

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Tahun						Kondisi Akhir
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	Tingkat Pengangguran	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran	%	7,07	6,92	6,77	6,62	6,47	6,32	5,80	5,80
				Persentase Penempatan Tenaga Kerja Formal	%	25,00	35,68	43,68	51,00	57,00	62,00	67,00	67,00
				Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Informal	%	1,45	5,19	15,19	25,00	33,00	40,00	47,00	47,00
2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	5,64	5,98	6,00	6,02	6,08	6,11	6,12	6,12
				Persentase Peningkatan Nilai Produksi	%	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	2,50	3,00	3,00
3	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	Nilai	B	BB	BB	A	A	A	A	A

Tabel 2.2
 Sesudah Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
 Kota Payakumbuh

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Tahun						Kondisi Akhir
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	Tingkat Pengangguran	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	-	-	-	-	-	93,55	93,75	93,75
2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	%	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	2,50	3,00	3,00
3	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	Nilai	B	BB	BB	A	A	A	A	A

2.2.4. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah yang berisikan program prioritas Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi agar lebih sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 tahun periode Renstra. Adapun strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Tabel. 2.3

Sebelum Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022

VISI RPJMD	Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat Dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang		
MISI RPJMD	1. Mewujudkan SDM Yang Handal, Sehat dan Kompetitif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	1. Menurunnya Angka Pengangguran	1. Meningkatkan Kualitas, Produktivitas dan Kesempatan Kerja	1. Fasilitasi Kemitraan Dengan Dunia Usaha dan Perluasan Kesempatan Kerja
			2. Peningkatan Daya Saing Angkatan Kerja Siap Pakai
MISI RPJMD	2. Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	1. Mendorong Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Melalui Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Industri Berbasis Sumberdaya Lokal	1. Peningkatan Kemampuan Manajerial dan SDM Pelaku Industri

			2. Peningkatan Kemampuan Industri Dalam Penerapan Standarisasi Mutu Produk
			3. Peningkatan Penerapan Teknologi Industri
			4. Pembentukan Sentra-Sentra Produk IKM Sebagai Pusat Kegiatan Ekonomi Masyarakat Yang Terintegrasi
MISI RPJMD	4. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Pemantapan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tabel. 2.4

Sudah Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Jangka Menengah
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
Tahun 2017-2022

VISI RPJMD	Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat Dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang		
MISI RPJMD	3. Mewujudkan SDM Yang Handal, Sehat dan Kompetitif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	1. Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	1. Meningkatkan Kualitas, Produktivitas dan Kesempatan Kerja	1. Fasilitasi Kemitraan Dengan Dunia Usaha dan Perluasan Kesempatan Kerja
			2. Peningkatan Daya Saing Angkatan Kerja Siap Pakai

MISI RPJMD	4. Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	1. Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	1. Mendorong Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Melalui Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Industri Berbasis Sumberdaya Lokal	1. Peningkatan Kemampuan Manajerial dan SDM Pelaku Industri
			2. Peningkatan Kemampuan Industri Dalam Penerapan Standarisasi Mutu Produk
			3. Peningkatan Penerapan Teknologi Industri
			4. Pembentukan Sentra-Sentra Produk IKM Sebagai Pusat Kegiatan Ekonomi Masyarakat Yang Terintegrasi
MISI RPJMD	4. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Pemantapan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijadikan dasar dalam penilaian kinerja atas pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan sejalan dengan Renstra

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022
sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sebelum Perubahan Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2016	Target Capaian Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran	%	7,07	6,92	6,77	6,62	6,47	6,32	5,80	5,80
		Persentase Penempatan Tenaga Kerja Formal	%	25,00	35,68	43,68	51,00	57,00	62,00	67,00	67,00
		Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Informal	%	1,45	5,19	15,19	25,00	33,00	40,00	47,00	47,00
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	5,64	5,98	6,00	6,02	6,08	6,11	6,12	6,12
		Persentase Peningkatan Nilai Produksi	%	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	2,50	3,00	3,00
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	Nilai	B	BB	BB	A	A	A	A	A

Tabel 2.6
 Sesudah Perubahan Indikator Kinerja Utama
 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2016	Target Capaian Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	-	-	-	-	-	93,55	93,75	93,75
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	%	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	2,50	3,00	3,00
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	Nilai	B	BB	BB	A	A	A	A	A

Tabel 2.7
Sebelum Perubahan Formula Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Formula
1	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran	%	Memenuhi SPM Kementerian Ketenagakerjaan	Jumlah pengangguran di bagi jumlah angkatan kerja kali seratus persen
		Persentase Penempatan Tenaga Kerja Formal	%	Memenuhi SPM Kementerian Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja formal yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja dibagi kali seratus persen
		Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Informal	%	Memenuhi SPM Kementerian Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja informal yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja kali seratus persen
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	Memenuhi SPM Kementerian Perindustrian	Jumlah kontribusi PDRB dari sector industri pengolahan di bagi jumlah PDRB kali seratus persen
		Persentase Peningkatan Nilai Produksi	%	Memenuhi SPM Kementerian Perindustrian	Nilai Produksi Th (n) - Nilai Produksi Th (n-1) dibagi Nilai Produksi Th (n-1) kali seratus persen
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	Nilai	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Menjadi Salah Satu Tolak Ukur Dalam Penyelenggaraan Pemerintah	

Tabel 2.8
Sesudah Perubahan Formula Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Formula
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	Memenuhi SPM Kementerian Ketenagakerjaan	Jumlah penduduk usia kerja yang bekerja pada tahun n di bagi jumlah angkatan kerja tahun n kali seratus persen
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	%	Memenuhi SPM Kementerian Perindustrian	Nilai Produksi Th (n) - Nilai Produksi Th (n-1) dibagi Nilai Produksi Th (n-1) kali seratus persen
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	Nilai	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Menjadi Salah Satu Tolak Ukur Dalam Penyelenggaraan Pemerintah	

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja adalah lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA. Berikut adalah Perjanjian Kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2022.

Tabel 2.9

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	93,75%
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3,00%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	A

Anggaran belanja langsung Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.11
 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis
 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Anggaran
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan	210.583.010	193.582.881	91,93%
			Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	32.411.440	31.308.550	96,60%
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	87.138.332	84.230.632	96,66%
			Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.238.900	15.153.280	93,31%
					Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.079.400	3.811.400	93,43%
Jumlah Anggaran Sasaran 1						350.451.082	328.086.743	93,62%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Anggaran
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran Dan Perwilayahan Industri	367.603.450	333.545.078	90,74%
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	30.108.415	29.572.080	98,22%
					Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri	535.312.899	521.108.928	97,35%
					Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	136.838.676	134.827.616	98,53%
			Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI Dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Yang Terintegrasi Dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	61.129.770	60.574.690	99,09%
Jumlah Anggaran Sasaran 2						1.069.863.440	1.019.053.702	95,25%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.065.330	46.617.230	99,05%
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	52.838.340	52.653.260	99,65%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Anggaran
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.372.480.665	2.243.928.282	94,58%
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.095.080	9.880.000	97,87%
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4.003.300	4.003.300	100%
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.848.960	48.704.060	99,70%
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.863.230	27.821.330	99,85%
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.004.560	6.004.560	100%
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000	13.387.900	99,17%
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.703.000	303.618.970	99,97%
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	570.000	570.000	100%
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.179.664	120.876.918	83,84%
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.277.120	117.546.768	99,38%
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	39.072.913	99,70%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	59.400.000	59.207.289	99,68%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Anggaran
					Operasional atau Lapangan			
					Pemeliharaan Mebel	5.638.600	5.593.600	99,20%
Jumlah Anggaran Sasaran 3						3.253.657.849	3.099.486.389	95,26%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagu kinerja financial organisasi dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antar target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja adalah kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (Penentuan posisi sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 91	Sangat Baik
2	76,00 – 90,99	Baik
3	66,00 – 75,99	Cukup
4	51,00 – 65,99	Kurang
5	$\leq 50,99$	Sangat Kurang

Dalam laporan ini, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian kelompok indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022 yang terdapat pada :

- Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang handal, sehat dan kompetitif.
- Misi 2 : Membangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan gerakan ekonomi bersama.

Adapun analisa dari sasaran strategis tersebut dalam mencapai misi Walikota serta tujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2022 dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Capaian Perjanjian Kinerja
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Tahun 2022

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Kriteria Kinerja
Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	93,75	94,84	101,16	Sangat Baik
Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	%	3,00	3.1	103,33	Sangat Baik
Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat	Nilai	A	A	100	Sangat Baik

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2022 : Rp.4.735.102.141,-

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2022 : Rp.4.507.201.524,-

Persentase : 95,19%

Dari tabel diatas, ketiga sasaran strategis yang terbagi dalam tiga indikator kinerja. Pada Tahun 2022, 2 indikator telah melebihi target yang ditetapkan dan satu indikator sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian yang tertinggi pada indikator Persentase Peningkatan Nilai Produksi dengan capaian 103,33%, diikuti indikator Persentase Penyerapan Tenaga Kerja dengan capaian 101,16% dan indikator Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat dengan capaian 100%.

Dari capaian Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang melebihi target, diharapkan ke depannya program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tetap berlanjut dengan capaian yang lebih baik lagi.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2022 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 melalui 3 (Tiga) sasaran dan 3 (Tiga) indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 3 (Tiga) sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh pada Tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja

Sasaran strategis ini merupakan salah satu komponen upaya mencapai tujuan Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan dan

Pengangguran. Hal-hal yang mendorong sasaran ini berkaitan dengan peningkatan serapan tenaga kerja melalui yaitu :

1. Pelatihan kerja
2. Pemagangan
3. Fasilitasi penempatan tenaga kerja

Upaya ini dilakukan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil dan mandiri. Melalui kegiatan ini diharapkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja meningkat sehingga mampu berkompetisi di pasar kerja baik dalam maupun luar negeri.

Untuk mengukur tingkat capaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria Kinerja
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	93,75%	94,84%	101,16%	Sangat Baik

Dengan rumus perhitungan :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah penduduk usia kerja Tahun 2022}}{\text{Jumlah angkatan kerja Tahun 2022}} \times 100\% \\
 &= \frac{70.127}{73.939} \times 100\% \\
 &= \mathbf{94,84\%}
 \end{aligned}$$

Sasaran Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel diatas mempunyai 1 (Satu) indikator diperoleh melebihi dari target. Indikator Persentase Penyerapan Tenaga Kerja realisasi sebesar 94,84% dari target sebesar 93,75% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adapun persentase capaian kinerjanya

101,16% dengan tingkat capaian melebihi target dalam kriteria Sangat Baik.

Rumusan indikator didapat dari kenaikan jumlah penduduk usia kerja pada Tahun 2021 sebanyak 69.498 orang sedangkan Tahun 2022 jumlah penduduk usia kerja naik sebanyak 70.127 orang atau naik 94,84%.

Grafik 3.1
Perbandingan Penyerapan Tenaga Kerja



Capaian indikator Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2022 sebesar 93,75%, dari target yang ditetapkan terealisasi sebesar 94,84%, telah melebihi target yang ditetapkan.

Pencapaian indikator diatas melalui :

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi. Untuk Tahun 2022 kegiatan berupa pelatihan processing roti/kue dengan peserta 16 orang, yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Mei sampai dengan 11 juni 2022 dan pelatihan menjahit dasar dengan peserta 32 orang, angkatan I dilaksanakan pada tanggal 28 Juni sampai dengan

20 Agustus 2022 dan angkatan II dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus sampai dengan 13 September 2022. Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan di Ruang Work Shop BLK Kota Payakumbuh.



Pelatihan Processing Roti/Kue



Pelatihan Menjahit Dasar

- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja pada Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dengan Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.

➤ Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja

Kegiatan yang dilaksanakan berupa pelatihan kewirausahaan dengan jumlah peserta 20 orang dan Kegiatan sosialisasi peluang kerja ke luar negeri dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah dilaksanakan pada tanggal 18 November 2022 yang dibuka oleh Pj. Walikota Payakumbuh dan dihadiri juga oleh Kepala UPT BP3MI Sumatera Barat yang bertempat di Aula Balaikota Payakumbuh dengan peserta 100 orang dan sosialisasi kepada siswa SMK se Kota Payakumbuh dan pengelola BKK (Bursa kerja Khusus) yang dilaksanakan tanggal 29 November 2022 di SMKN2 Payakumbuh dengan peserta 100 orang.



Pelatihan kewirausahaan

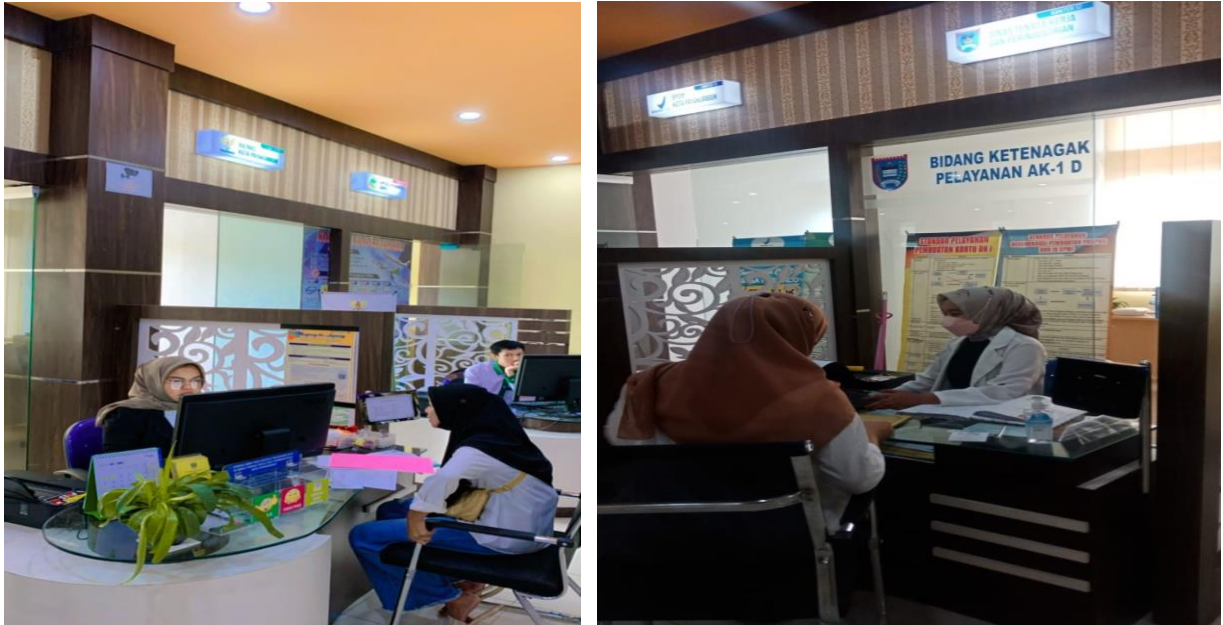




Sosialisasi peluang kerja ke luar negeri dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia

➤ Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Kegiatan pembuatan AK-1 bagi pencari kerja yang dilakukan di Mall Pelayanan Publik (MPP), Informasi Bursa Kerja Online tentang lowongan pekerjaan melalui sistem Ketenagakerjaan (SISNAKER) Kementerian Tenaga Kerja. Melalui aplikasi Sisnekaer ini, seluruh masyarakat pencari kerja dan masyarakat usia kerja dapat memperoleh segala bentuk informasi terkait dengan ketenagakerjaan, seperti Lowongan pekerjaan, pendidikan dan pelatihan dll. Selain melalui aplikasi Sinaker, penyebarluasan informasi bursa kerja melalui media sosial seperti Facebook, Instagram Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.



Pelayanan Pembuatan AK-1

a) Jumlah Pencari Kerja Menurut Pendidikan Di Kota Payakumbuh Tahun 2022

PENDIDIKAN	Tahun 2022		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SD	1	1	2
SLTP	25	39	64
SLTA	179	173	352
DIPLOMA I	-	-	-
DIPLOMA II	-	-	-
DIPLOMA III	10	9	19
SARJANA / S.I	59	92	149
PASCA-SARJANA / S.II	1	-	1
Jumlah	273	314	587

b) Penempatan Tenaga Kerja Menurut Pendidikan Di Kota Payakumbuh Tahun 2022

PENDIDIKAN	Tahun 2022		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SD	-	-	-
SLTP	6	22	28
SLTA	70	93	163
DIPLOMA I	-	-	-
DIPLOMA II	-	-	-
DIPLOMA III	5	8	13
SARJANA / S.I	42	51	93
PASCA-SARJANA / S.II	-	-	-
	123	174	297

c) Tenaga Kerja yang telah disalurkan Tahun 2022

No.	Keterangan	Tahun 2022 (orang)
1.	Tenaga Kerja Indonesia ke LN	48
2.	Dalam Negeri (Swasta)	118
3.	Dalam Negeri Lainnya	131
4.	Magang ke Malaysia	-
5.	Magang ke Thailand	-
6.	Magang ke Jepang	-

- 3). Program Hubungan Industrial pada Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Pada awalnya ditargetkan menyelesaikan 3 kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan, tapi target awal ini direvisi pada APBD perubahan menjadi 1 kasus mengingat sampai bulan Oktober 2022 baru 1 kasus perselisihan yang didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

Kasus yang masuk adalah dari PT. BPR Gema Ampek Koto Sejahtera.



Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Anggaran pendukung untuk indikator Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja sebesar Rp. 350.451.082,- dan teralisasi sebesar Rp. 328.086.743,- atau sebesar 93,62%.

1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Perkembangan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Tahun 2020 - 2022 :

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja
Tahun 2020-2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	-	-	93,55%	93,53%	93,75%	94,84%

Capaian sasaran strategis pertama Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja mempunyai 1 (Satu) indikator kinerja, persentase penyerapan tenaga kerja pada Tahun 2020 tidak ada targetnya, dikarenakan ada perbaikan indikator di Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan tahun sebelumnya Tahun 2021, hal ini di sebabkan banyaknya penduduk usia kerja yang mendapatkan kesempatan bekerja dari perusahaan sehingga formasi dapat dipenuhi oleh pencari kerja sesuai dengan keahlian dibutuhkan.

1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja dengan Target Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2022	% Capaian
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	94,84%	93,75%	101,16%

Tahun 2022 merupakan tahun ke 5 implementasi Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, indikator capaian kinerja adalah Persentase penyerapan tenaga kerja sebesar 94,84%, yang berarti melampaui target capaian akhir Renstra sebesar 93,75%, atau memiliki persentase capaian 101,16%.

1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1 Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja, disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya penyebarluasan informasi pasar kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melalui pasar kerja online, media sosial dinas (Facebook, Instagram) website dinas, aplikasi My Kopay dan manual.
2. Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja melalui kegiatan pelatihan dan pemagangan dan dukungan dari pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui program-program pelatihan berbasis kluster kompetensi yang dilaksanakan di BLK Payakumbuh yang pendanaannya bersumber dari APBN dan APBD provinsi Sumatera Barat tahun 2022.
3. Adanya kegiatan memfasilitasi penempatan tenaga kerja ke luar propinsi/luar negeri.
4. Potensi untuk lapangan kerja sektor informal yang bisa diserap oleh UKM dan IKM di Kota Payakumbuh sangat besar.
5. Potensi pencari kerja sektor informal yang cukup besar.

Faktor Penghambat :

1. Terbatasnya ketersediaan lowongan pekerjaan sektor formal.
2. Masih adanya lowongan pekerjaan belum terisi karena pencari kerja tidak memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja.
4. Masih adanya pencari kerja yang belum memiliki keterampilan

dan keahlian yang dibutuhkan dunia kerja.

5. Keterbatasan permodalan untuk membuka usaha baru.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 1 Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Pengadaan sarana promosi lowongan kerja/pasar kerja yang lebih representatif dan Penambahan personil pejabat fungsional pengantar kerja
2. Melaksanakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi yang banyak dibutuhkan oleh dunia kerja
3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan melakukan pelatihan peningkatan produktifitas dan up-skill bagi tenaga kerja
4. Memfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha baru melalui perbankan dan bantuan-bantuan lain melalui program Pemerintah Pusat

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisa Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	93,75%	94,84%	101,16%	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dalam meningkatkan kompetensi SDM pencari kerja - Kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBVP) Medan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana promosi lowongan kerja/pasar kerja yang lebih representatif dan Penambahan personil pejabat fungsional pengantar kerja 2. Melaksanakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi yang banyak dibutuhkan oleh dunia kerja 3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan melakukan pelatihan peningkatan produktifitas dan up-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisa Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
							skill bagi tenaga kerja 4. Memfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha baru melalui perbankan dan bantuan-bantuan lain melalui program Pemerintah Pusat

Tabel diatas menunjukkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja mempunyai 1 indikator sasaran yaitu Persentase penyerapan tenaga kerja dengan tingkat capaian rata-rata lebih dari 100%.

Adapun evaluasi dan analisis menurut sasaran strategis dikarenakan program pemulihan ekonomi daerah, dimana salah satu kegiatan adalah dengan memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat/pencari kerja yang tidak mempunyai keahlian/keterampilan, anak yang menganggur/putus sekolah, anak yang kurang mampu serta masyarakat yang terdampak covid 19 dan dampak dari kenaikan harga BBM.

Komponen yang menunjang keberhasilan adalah selain dari sumber dana APBD sebanyak 52 orang dan ditambah adanya kerjasama dengan instansi terkait seperti pelatihan boarding kejuruan pariwisata sebanyak 11 orang yang bersumber dari dana APBN (BBPVP Medan), pelatihan pemberdayaan bagi keluarga purna PMI sebanyak 20 orang yang sumber dana dari UPT BP2Mi (APBN), pelatihan membuat aneka macam roti/kue untuk pencari kerja sebanyak 16 orang yang sumber dana dari BLK Kota Payakumbuh (APBN).



Pelatihan Cabinet Maker BBPVP Medan



Pelatihan Comersial Cookery di BBPVP Medan

1.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.7
Analisis atas Efisiensi Sumber Daya
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja				350.451.082	328.086.743	93,62%	6,38

		Indikator Kinerja			Anggaran			
	Persentase penyerapan tenaga kerja	93,75%	94,84%	101,16%				

a. Analisis efisiensi penggunaan anggaran

Merujuk pada implementasi sasaran kinerja, Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja pada Tahun 2022, maka dalam konteks efisiensi penggunaan sumber anggaran berada pada kategori Sangat Baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya efisiensi anggaran sebesar 6,38 dibandingkan besaran anggaran yang diplot. Dengan penggunaan anggaran yang tersedia mencapai 93,62%.

b. Analisis efisiensi sumber daya manusia

Kualifikasi jabatan struktural dan jabatan fungsional membidangi sasaran Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja dengan hasil tingkat capaian lebih dari 100% berarti dilaksanakan secara efektif akan tetapi menurut beban kerja yang menunjang kinerja sasaran ini masih kurang dari jumlah pegawai yang ada sebanyak 8 orang yang terdiri dari : 5 ASN dan 3 TJP.

1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Merujuk pada hasil inventarisasi indikator realisasi sasaran kinerja 1, dapat disimpulkan bahwa seluruh program/kegiatan menjadi bagian dari (menunjang) keberhasilan pencapaian kinerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai capaian $\leq 100\%$. Secara umum, capaian tersebut diperoleh karena adanya sinkronisasi program/kegiatan dengan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional, sehingga output dan outcome program/kegiatan lebih terarah dan saling mendukung adalah :

Tabel 3.8

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Kurang
1	Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	94,84%				
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Berwirausaha	198%	Menunjang
					Jumlah Tenaga Kerja Yang Diserap Wirausaha	100%	
				Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi	Jumlah Pencari Kerja Yang Dilatih dan Bersertifikat	100%	Menunjang
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	113,79%	Menunjang
				Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	100%	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Di Bursa Kerja Online	234,8%	Menunjang
				Program Hubungan Industrial	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	33,33%	Menunjang
				Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	100%	Menunjang

Sasaran 2

Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan Meningkatkan Produktivitas Sektor Industri. Hal-hal yang mendorong sasaran ini berkaitan dengan peningkatan produksi industri pengolahan melalui :

1. Pembinaan dan pelatihan bagi IKM
2. Pelatihan sarana produksi Teknologi Tepat Gunga (TTG) bagi IKM
3. Fasilitasi kegiatan Dekranasda
4. Fasilitasi dalam pengurusan sertifikasi halal
5. Monitoring dan evaluasi IKM

Upaya ini dilakukan untuk membentuk IKM yang berkualitas dan mandiri. Melalui kegiatan ini diharapkan meningkatkan produksi dari industri IKM sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan ekonomi.

Untuk mengukur tingkat capaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

2.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria Kinerja
2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3,00%	3,1%	103,33%	Sangat Baik

Dengan rumus perhitungan :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Nilai Produksi Th 2022} - \text{Nilai Produksi Th 2021}}{\text{Nilai Produksi Th 2021}} \times 100\% \\
 &= \frac{305.581.059.000 - 296.463.459.000}{296.463.459.000} \times 100\% \\
 &= \mathbf{3,1\%}
 \end{aligned}$$

Pada Sasaran 2 ini terdiri dari 1 Indikator Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 103,33% dengan kategori Sangat Baik. Hal ini disebabkan dengan sudah berangsur pulihnya sektor-sektor ekonomi.

Capaian indikator Persentase Peningkatan Nilai Produksi Tahun 2022 mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya, yang mana pada Tahun 2021 sebesar 15,32% sedangkan Tahun 2022 sebesar 3,1%, meskipun demikian masih melebihi dari target yang ditetapkan.

Pencapaian indikator diatas melalui :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri pada Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 yaitu :

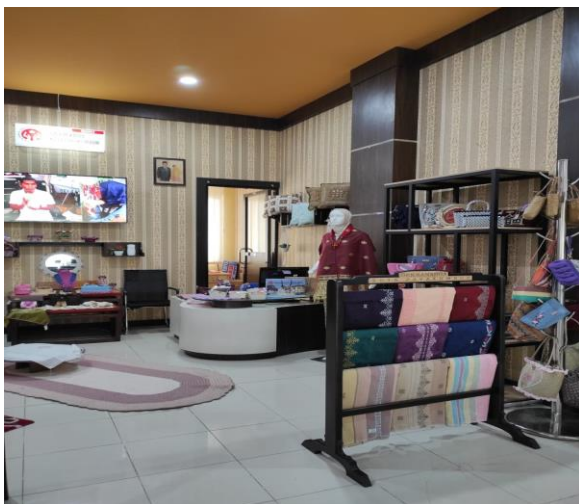
- Pembuatan Buku Memori Dekranasda Kota Payakumbuh Tahun 2012-2022 dan Buku Tenun Balai Panjang.
- Mengikuti Minangkabau Fashion Heritage 2022 di Jakarta yang melibatkan disainer Kota Payakumbuh Berry Mirsha dan Hilman Samudera dengan tema Djembatan dengan 10 stel desain.



- Mengikuti even Minangkabau Fashion Festival 2022 di Padang



- Gallery Kriya Dekranasda di Mall Pelayanan Kota Payakumbuh



- Kegiatan Pelatihan dan Workshop penguatan peralatan produksi bagi IKM melalui TTG

Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 14 Juni sampai dengan 16 Juni 2022 yang dilaksanakan di Bengkel Surau Pandam Teknik di Kelurahan Payobasuang Kecamatan Payakumbuh Timur dengan Instruktur pelatihan/narasumber dari Indra Kesuma Beni Anwar/Payakumbuh Welder yang sudah berlisensi BNSP. Kegiatan ini diikuti oleh 10 orang peserta IKM las baru.



- Kegiatan Workshop Diversifikasi Produk Tenun, dilaksanakan pada tanggal 8 Juli sampai dengan 14 Juli 2022 di Aula Sentra Rendang Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Jalan Gelatik Kelurahan Tigo Koto Diate Kecamatan Payakumbuh Utara dengan Instruktur : Remon Nofita.

Dengan peserta 15 orang yang berasal dari IKM Kerajinan Tenun Kota Payakumbuh.



➤ Kegiatan UPTD P3R Sentra Rendang

- Operasional Rutin. Operasional rutin terkait dengan penyelenggaraan administrasi tata usaha, praktek produksi, kebersihan, rapat penyambutan tamu, pembayaran listrik, belanja jasa (operator mesin, kebersihan dan keamanan).
- Pemeliharaan. Pekerjaan ini meliputi pemeliharaan alat-alat dapur, pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga serta pemeliharaan gedung kantor.



- Kegiatan produksi rendang



- Kunjungan Tamu ke UPTD P3R Sentra Rendang

DAFTAR KUNJUNGAN TAMU TAHUN 2022	
JANUARI	
Kunjungan dari Kota Kendari	04 Januari 2022
Kunjungan Mahasiswi Kampus Unand Kota Padang	10 Januari 2022
Kunjungan Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian Kampar	20 Januari 2022
FEBRUARI	
Kunjungan HRA UMKM Provinsi Sumatera Barat	02 Februari 2022
Kunjungan Mahasiswa Universitas Unand Padang	
Kunjungan Tamu dari Inggris	15 Februari 2022
Kunjungan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Barat	15 Februari 2022
Kunjungan Koperindag Kota Sawah Lunto	16 Februari 2022
Kunjungan KPP Pratama Payakumbuh	18 Februari 2022
Kunjungan UMKM Okece Indonesia	23 Februari 2022
MARET	
Kunjungan SDIT Mutiara Hati Kota Payakumbuh	09 Maret 2022
Kunjungan UIN IB Padang	09 Maret 2022
Kunjungan Dari Pengusaha Rendang (BADASO RENDANG)	23 Maret 2022
APRIL	
Kunjungan	12 April 2022
MEI	
Kunjungan SDN Lima Puluh Kota	23 Mei 2022

Kunjungan ACT (Aksi Cepat Tanggap)	23 Mei 2022
Kunjungan BANK BTPN Kota Payakumbuh	23 Mei 2022
Kunjungan Kementerian UKM	25 Mei 2022
JUNI	
Kunjungan Tim Penelitian dari Pusat Riset Kewilayahan BRIN (EX-LIPI)	02 Juni 2022
Kunjungan	08 Juni 2022
Kunjungan Standar SNI	24 Juni 2022
Kunjungan Kementerian Perindustrian	29 Juni 2022
Kunjungan	08 Juni 2022
JULI	
Kunjungan Universitas Malaysia	04 Juli 2022
Kunjungan Mahasiswi Universitas Andalas Kota Padang	07 Juli 2022
AGUSTUS	
Kunjungan Dekan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang	02 Agustus 2022
Kunjungan Koperasi Wanita Ikaboga Kota Padang	20 Agustus 2022
Kunjungan UIN Sultan Syarif Fakultas Ushuluddin Kota Pekanbaru	25 Agustus 2022
SEPTEMBER	
Kunjungan Tim Penilaian Peduli Wisata Award (PWA) 2022	09 September 2022
Kunjungan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan	13 September 2022
SCHOOL OF Randang Disparpora Kabupaten Pesisir Selatan	21 September 2022
Kunjungan Kemenag Provinsi Sumatera Barat	22 September 2022
Kunjungan BLK Provinsi Sumatera Barat	26 September 2022
OKTOBER	
Kunjungan Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang	07 Oktober 2022
SCHOOL OF Randang DISPARPORA kota Padang Panjang	14 Oktober 2022
SCHOOL OF Randang Dinas Pendidikan Tanah Datar	18 Oktober 2022
Kunjungan Mahasiswa/mahasiswi Universitas Andalas Kota Padang	18 Oktober 2022
Kunjungan Mahasiswa/mahasiswi Universitas Riau	26 Oktober 2022
Kunjungan angkatan 86	27 Oktober 2022
NOVEMBER	
SCHOOL OF RANDANG Disparpora Kota Padang	03 November 2022
Kunjungan Universitas Negeri Padang	08 November 2022
Kunjungan Mahasiswi/mahasiswa Universitas Unand Kota Padang	09 November 2022
SCHOOL OF Randang Kabupaten Bengkalis	16 November 2022

SCHOOL OF Randang SD AL Hufaz Kota Payakumbuh	30 November 2022
DESEMBER	
SCHOOL OF RANDANG SMKN 1 Matur Kabupaten Agam	01 Desember 2022
Kunjungan SMP Islam Raudatul Jannah	05 Desember 2022
Kunjungan LOKA POM Bau-bau	06 Desember 2022
SCHOOL OF Randang ICBS kota Payakumbuh	19 Desember 2022
Kunjungan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Selatan	21 Desember 2022

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota pada Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 yaitu :

Fasilitasi IKM dalam pendaftaran sertifikat halal, untuk Tahun 2022 yang ditarget pendaftaran ternyata tidak tercapai 100%, dari target 6 IKM/Kelompok Produk terealisasi 6 IKM/Kelompok Produk.

Tahapan dalam pelaksanaan pengurusan sertifikasi halal 4 hal yaitu :

- Membentuk Tim Persiapan Swakelola melalui SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
- Membentuk Tim Pengawas Swakelola melalui SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
- Tim persiapan melakukan seleksi terhadap IKM calon penerima bantuan/fasilitasi sertifikasi halal. Tim melakukan identifikasi terhadap IKM yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitasi seperti kepemilikan dokumen NIB dan PIRT/MD dan melaksanakan wawancara kesiapan mengikuti proses sertifikasi serta juga mempertimbangkan potensi IKM untuk berkembang di masa mendatang.



Proses seleksi calon penerima bantuan/ fasilitasi sertifikasi halal

- Menetapkan IKM penerima bantuan fasilitasi melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Nomor 530/42/DTKP-IND/VI/2022 tentang Penetapan Bantuan dan/atau Subsidi Pengurusan Sertifikasi Halal Industri Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2022
- Menetapkan LPPOM MUI Sumatera Barat sebagai pelaksana swakelola melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Nomor 530/43/DTKP-IND/VI/2022.

Pada kegiatan ini ditetapkan penerima bantuan pembiayaan sertifikasi IKM sebanyak 6 pelaku usaha/kelompok produk.

No	Nama IKM	Nama Pimpinan	Jenis Produk	Alamat
1	Rendang Makyus	Wahyu Hidayat	Daging dan produk olahan daging	Kel. Parak Batuang
2	Rendang Mala	Titin Risti Atmala Sari	Daging dan Produk Olahan Daging	Balai Batimah, Payakumbuh Timur

No	Nama IKM	Nama Pimpinan	Jenis Produk	Alamat
3	PT. Kampung Guci Artisan	Cherry Lenggogeni	Daging dan produk olahan daging	Parak Batuang, Payakumbuh Barat
4	Yo Randang	Yelsi	Bumbu dan Kondimen	Kel.Tanjung Gadang Sungai Pinago
5	Datona Cookies	Ermawilis	Produk Bakeri	Kel. Napar, Kec. Payakumbuh Utara
6	Aryona	Adriati	Minuman botanikal / rempah (Bentuk padat / cair)	Kel. Koto Tangah

Anggaran pendukung untuk indikator Persentase Peningkatan Nilai Produksi sebesar Rp. 1.130.993.210,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.079.628.392,- atau sebesar 95,46%.

2.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Perkembangan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Tahun 2020 -2022 :

Tabel 3.10
Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja
Tahun 2020-2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	2,00	- 13,8%	2.50%	15,32%	3,00%	3,1%

Capaian sasaran strategis kedua Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri mempunyai 1 (Satu) indikator kinerja, persentase peningkatan nilai produksi Tahun 2022 mengalami penurunan di tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan nilai produksi industri di Kota Payakumbuh sedikit melebihi target yaitu 3,1%. Kondisi ini dipicu oleh banyaknya pelaku IKM Kota Payakumbuh yang mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi salah satu persyaratan wajib bagi pelaku usaha dalam berbagai urusan, sehingga IKM yang dulunya belum memiliki izin usaha sekarang menjadi suatu keharusan bagi IKM untuk memiliki izin usaha. Sebagai gambaran di tahun 2021 jumlah IKM Kota Payakumbuh berkisar 1.928 unit usaha, akan tetapi tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 2.369 unit usaha, meningkat lebih kurang 441 IKM (23%). Dengan tajamnya peningkatan jumlah IKM di Kota Payakumbuh tentu Nilai produksi juga ikut terdongkrak, meskipun di tahun 2019 hingga 2021 kondisi ekonomi memburuk akibat pandemi Covid-19 serta di tahun 2022 terjadi inflasi dan kenaikan harga BBM, target nilai produksi masih dapat dicapai.

2.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.11

Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja dengan Target Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2022	% Capaian
2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3,1%	3,00%	103,33%

Tahun 2022 merupakan tahun ke 5 implementasi Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, indikator capaian kinerja adalah Persentase Peningkatan Nilai Produksi sebesar 3,1%, yang berarti melampaui target capaian akhir Renstra sebesar 3,00%, atau memiliki persentase capaian 103,33%.

2.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri, disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Ketersediaan Anggaran Pemerintah (APBD Kota Payakumbuh, APBD Propinsi, dan APBN)
2. Kondisi ekonomi yang sudah mulai pulih pasca pandemi covid 19
3. Distribusi bahan baku dan pengiriman produk yang lebih lancar pasca pandemi covid 19
4. Meningkatnya kunjungan wisatawan pasca covid 19
5. Ketersediaan bahan baku yang mencukupi
6. Partisipasi aktif Kementerian/Lembaga/Instansi memfasilitasi IKM dalam melakukan pengurusan sertifikasi mutu produk
7. Ketersediaan dukungan teknologi tepat guna
8. Peluang pasar produk industri yang sudah mulai terbuka baik pasar domestik maupun internasional
9. Meningkatnya pemanfaatan e-commerce oleh pelaku IKM
10. Mulai tumbuhnya wirausahawan baru

Faktor Penghambat :

1. Kenaikan harga BBM Bersubsidi dan Inflasi
2. Kualitas SDM Pelaku IKM yang umumnya masih rendah
3. Belum optimalnya sinergisitas antar Perangkat Daerah
4. Belum optimalnya penerapan SOP dalam pelaksanaan produksi yang mengacu kepada prinsip-prinsip produksi yang baik oleh IKM

5. Masih rendahnya kesadaran pelaku IKM akan pentingnya sertifikasi mutu produk
6. Anggaran yang tersedia belum optimal dalam mendukung peningkatan kapasitas IKM dan Kualitas produk yang dihasilkan
7. Ketersediaan jumlah tenaga ahli dan tenaga fungsional Pembina IKM yang masih kurang
8. Belum optimalnya IKM dalam memanfaatkan peluang pasar yang tersedia
9. Masih minimnya inovasi dan kreatifitas IKM dalam pengembangan produk
10. Belum optimalnya pengelolaan Sentra-Sentra IKM yang ada
11. Masih minimnya kolaborasi antar IKM, IKM dengan Industri Besar, dan IKM dengan stakeholder terkait

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 2 Meningkatkan Produktivitas Sektor Industri, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Stabilitas ekonomi dan angka inflasi
2. Implementasi program dan kegiatan yang berkesinambungan
3. Meningkatkan komitmen dan kerjasama lintas sektor
4. Ketersediaan anggaran yang memadai
5. Meningkatkan ketersediaan bahan baku
6. Meningkatkan pembinaan terhadap IKM secara komprehensif
7. Meningkatkan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) oleh IKM
8. Menghubungkan IKM dengan Industri Besar dan sektor ekonomi lainnya
9. Meningkatkan pemasaran produk IKM melalui optimalisasi pemasaran online, optimalisasi strategi promosi, optimalisasi pembangunan jejaring dengan stakeholder terkait baik di dalam maupun luar negeri
10. Optimalisasi pengelolaan sentra-sentra IKM

Tabel 3.12
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisa Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	3,00%	3,1%	103,33%	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan peningkatan nilai produksi pelaku usaha/IKM melalui TTG dan diservikasi produk - Memfasiliatsi dalam pengurusan sertifikat halal bagi IKM - Adanya kerjasama dengan BI (CSR) dalam bentuk pelatihan-pelatihan bagi IKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stabilitas ekonomi dan angka inflasi 2. Implementasi program dan kegiatan yang berkesinambungan 3. Meningkatkan komitmen dan kerjasama lintas sektor 4. Ketersediaan anggaran yang memadai 5. Meningkatkan ketersediaan bahan baku 6. Meningkatkan pembinaan terhadap IKM secara komprehensif 7. Meningkatkan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) oleh IKM 8. Menghubungkan IKM dengan Industri Besar dan sektor ekonomi lainnya 9. Meningkatkan pemasaran produk IKM melalui optimalisasi pemasaran online, optimalisasi strategi promosi, optimalisasi pembangunan jejaring dengan stakeholder terkait baik di dalam maupun luar negeri 10. Optimalisasi pengelolaan sentra-sentra IKM

Tabel diatas menunjukkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya Produktivitas Sektor Industrimempunyai 1 indikator sasaran yaitu Persentase peningkatan nilai produksi dengan tingkat capaian rata-rata lebih dari 100%.

Adapun evaluasi dan analisis menurut sasaran strategis dikarenakan program pemulihan ekonomi daerah, dimana salah satu kegiatan adalah dengan memberikan pelatihan bagi IKM terkait dalam perkembangan teknologi tepat guna, diversifikasi produk TTG yang bertujuan menjadikan IKM sebagai target konsumen dalam persaingan pasar dan meningkatkan peran IKM dalam menunjang produktifitas IKM Kota Payakumbuh.

Komponen yang menunjang keberhasilan adalah bekerjasama dengan instansi terkait dan BI (CSR) dalam bentuk pelatihan-pelatihan bagi IKM.

2.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.13
Analisis atas Efisiensi Sumber Daya
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri				1.130.993.210	1.079.628.392	95,46%	4,54
	Persentase peningkatan nilai produksi	3,00%	3,1%	103,33%				

a. Analisis efisiensi penggunaan anggaran

Merujuk pada implementasi sasaran kinerja, Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri pada Tahun 2022, maka dalam konteks efisiensi penggunaan sumber anggaran berada pada kategori Sangat Baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya efisiensi anggaran sebesar 4,54% dibandingkan

besaran anggaran yang diplot. Dengan penggunaan anggaran yang tersedia mencapai 95,46%.

b. Analisis efisiensi sumber daya manusia

Kualifikasi jabatan struktural dan jabatan fungsional membidangi sasaran Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri dengan hasil tingkat capaian lebih dari 100% berarti dilaksanakan secara efektif akan tetapi menurut beban kerja yang menunjang kinerja sasaran ini masih kurang dari jumlah pegawai yang ada sebanyak 23 orang yang terdiri dari : 6 ASN dan 17 TJP.

2.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Merujuk pada hasil inventarisasi indikator realisasi sasaran kinerja 2, dapat disimpulkan bahwa seluruh program/kegiatan menjadi bagian dari (menunjang) keberhasilan pencapaian kinerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai capaian $\leq 100\%$. Secara umum, capaian tersebut diperoleh karena adanya sinkronisasi program/kegiatan dengan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional, sehingga output dan outcome program/kegiatan lebih terarah dan saling mendukung adalah :

Tabel 3.14

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Kurang
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase peningkatan nilai produksi	3,1%				
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	- Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	15,52%	Menunjang
					- Persentase Sentra/Klaster Industri Yang	125%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Kurang
					Tertata		
				Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penerapan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Yang Disusun	100%	Menunjang
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	- Persentase Industri Yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk	305,55%	Menunjang
					- Jumlah Produk Industri Yang Mendapat Sertifikat	600%	
				Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Industri Yang Difasilitasi	100%	Menunjang

Adapun perkembangan usaha industri di Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.15
Data Perkembangan Usaha Industri Kota Payakumbuh
Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Unit Usaha	unit	1,963	1,783	1,853	1,902	1,928	2,000
2	Formal	unit	594	225	583	630	643	905
3	Non Formal	unit	1,369	1,558	1,270	1,272	1,285	1,095
4	Tenaga Kerja	orang	4,486	5,854	6,106	6,271	6,308	6,485
5	Nilai Investasi (ribu)	Rp.	86,567,512	86,742,512	88,040,791	95,649,716	95,954,716	101,121,716
6	Nilai Produksi (ribu)	Rp.	364,355,333	337,720,000	342,785,800	257,089,350	296,463,459	305,561,059

1. Jumlah IKM meningkat dari 1.928 unit usaha di tahun 2021 menjadi 2.000 unit usaha pada tahun 2022, meningkat lebih kurang 72 IKM (3,73%). Hal ini disebabkan karena banyaknya pelaku IKM Kota Payakumbuh yang mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi salah satu persyaratan wajib bagi pelaku usaha dalam berbagai urusan, sehingga pelaku usaha yang dulunya enggan mengurus perizinan menjadi terpaksa membuat izin usaha. Data IKM yang mengurus NIB ini diperoleh dari DPMPSTSP yang hanya bisa diperoleh dari data OSS per 31 Desember 2022.
2. Penambahan IKM sebanyak 262 unit usaha hanya terjadi di sektor industri formal saja. Pada tahun 2021 tercatat 643 unit usaha industri formal (industri yang memiliki perizinan) menjadi 905 unit usaha pada tahun 2022, meningkat sebanyak 262 IKM (40,75%).
3. Untuk IKM sektor Non Formal mengalami penurunan, pada tahun 2022 tercatat 1.095 sedangkan tahun 2021 tercatat 1.285 unit usaha turun sebanyak 190 unit usaha atau 14, 79%. Disebabkan IKM di Kota Payakumbuh sudah banyak yang mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga bertambah unit usaha disektor industri formal.
4. Dengan meningkatnya jumlah unit usaha industri di Kota Payakumbuh yang sebelumnya 1.928 menjadi 2.000 unit usaha, secara tidak langsung meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 6.485 dari tahun sebelumnya, meningkat sebesar 2,80%.

5. Nilai investasi sektor industri di Kota Payakumbuh diperkirakan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah IKM di Kota Payakumbuh. Nilai produksi industri di Kota Payakumbuh sedikit melebihi target yaitu 3,1%. Kondisi ini dipicu oleh banyaknya pelaku IKM Kota Payakumbuh yang mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi salah satu persyaratan wajib bagi pelaku usaha dalam berbagai urusan, sehingga IKM yang dulunya belum memiliki izin usaha sekarang menjadi suatu keharusan bagi IKM untuk memiliki izin usaha. Sebagai gambaran di tahun 2021 jumlah IKM Kota Payakumbuh berkisar 1.928 unit usaha, akan tetapi tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 2.000 unit usaha, meningkat lebih kurang 72 IKM (3,73%). Dengan peningkatan jumlah IKM di Kota Payakumbuh tentu Nilai produksi juga ikut terdongkrak, meskipun di tahun 2019 hingga 2021 kondisi ekonomi memburuk akibat pandemi Covid-19 serta di tahun 2022 terjadi inflasi dan kenaikan harga BBM, target nilai produksi masih dapat dicapai.

Demikian juga industri kecil formal dapat berkembang menjadi industri menengah dan besar formal. Dengan dimilikinya legalitas usaha, serta makin meningkatnya kualitas dan kuantitas produk maka diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri.

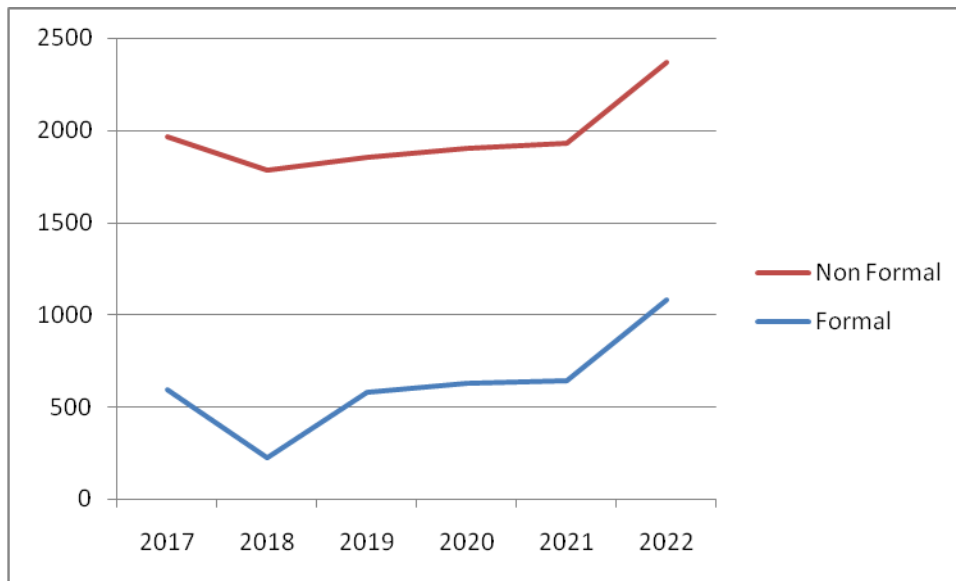
Tabel 3.16

Jumlah Usaha Industri Berdasarkan Klasifikasi Usaha

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Formal	unit	594	225	583	630	643	1,084
2	Non Formal	unit	1,369	1,558	1,270	1,272	1,285	1,285

Grafik 3.2

Jumlah Usaha Industri Berdasarkan Klasifikasi Usaha



Sektor industri bagi suatu daerah merupakan sektor yang menimbulkan perkembangan jauh lebih pesat untuk pertumbuhan ekonomi. Analisis teoritis dan penyelidikan empiris telah membuktikan bahwa kemajuan teknologi merupakan penentu utama dari lajunya pertumbuhan ekonomi. Tanpa sektor industri, daerah yang mulai berkembang akan mengalami pertumbuhan lebih lambat dari pada yang telah dicapainya pada tahun-tahun lalu. Oleh karena itu, sektor industri menjadi tumpuan harapan bagi pembangunan suatu daerah.

Kota Payakumbuh memiliki 2.000 unit Industri Kecil dan Menengah yang terdiri dari berbagai macam jenis Industri. Seperti industri kerajinan, industri sandang dan kulit, industri kimia dan bangunan, industri logam mesin dan elektronika dan industri pangan. Dimana industri yang paling banyak di Kota Payakumbuh yaitu Industri makanan seperti industri Rendang, gelamai, keripik sanjai, dan sebagainya.

Kota Payakumbuh merupakan kota penghubung antara Kota Padang dengan Kota Pekanbaru, dari Kota Payakumbuh dapat juga terhubung ke jalur lintas tengah Sumatera tanpa mesti melewati Kota Bukittinggi. Dan juga merupakan sebagai Kota persinggahan.

Sasaran 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Untuk mengukur tingkat capaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

3.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.17

Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria Kinerja
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat	A	A	100%	Sangat Baik

Pada Sasaran 3 ini terdiri dari 1 Indikator Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 100% dengan kategori Sangat Baik.

Didukung melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi 100%.

Anggaran pendukung untuk indikator Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat sebesar Rp. 3.253.657.849,- dan teralisasi sebesar Rp. 3.099.486.389,- atau sebesar 95,26%.

3.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Perkembangan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2020 - 2022 :

Tabel 3.18
Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja
Tahun 2020-2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A

Capaian sasaran strategis ketiga Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai 1 (Satu) indikator kinerja, Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat Tahun 2022 mendapat nilai A.

3.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.19
Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja dengan Target Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2022	% Capaian
3	Meningkatnya Akuntabilitas	Hasil Penilaian AKIP Dinas	A	A	100%

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat			
--	---	--	--	--

Tahun 2022 merupakan tahun ke 5 implementasi Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, indikator capaian kinerja adalah Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat dengan nilai A, yang berarti target capaian akhir Renstra dengan nilai A tercapai, atau memiliki persentase capaian 100%.

3.4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.20
Analisis atas Efisiensi Sumber Daya
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian				3.253.657.849	3.099.486.389	95,26%	4,74
	Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat	A	A	100%				

a. Analisis efisiensi penggunaan anggaran

Merujuk pada implementasi sasaran kinerja, Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian pada Tahun 2022, maka dalam konteks efisiensi penggunaan sumber anggaran berada pada kategori Sangat Baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya efisiensi

anggaran sebesar 4,74% dibandingkan besaran anggaran yang diplot. Dengan penggunaan anggaran yang tersedia mencapai 95,26%.

b. Analisis efisiensi sumber daya manusia

Kualifikasi jabatan struktural dan jabatan fungsional membidangi sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dengan hasil tingkat capaian dari 100% berarti dilaksanakan secara efektif akan tetapi menurut beban kerja yang menunjang kinerja sasaran ini masih kurang dari jumlah pegawai yang ada sebanyak 13 orang yang terdiri dari : 9 ASN dan 4 TJP.

3.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Merujuk pada hasil inventarisasi indikator realisasi sasaran kinerja 3, dapat disimpulkan bahwa seluruh program/kegiatan menjadi bagian dari (menunjang) keberhasilan pencapaian kinerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai capaian $\leq 100\%$. Secara umum, capaian tersebut diperoleh karena adanya sinkronisasi program/kegiatan, sehingga output dan outcome program/kegiatan lebih terarah dan saling mendukung adalah :

Tabel 3.21

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Kurang
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Hasil Penilaian AKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh Inspektorat	100				
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	101,41%	Menunjang
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan	100%	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Kurang
				Perangkat Daerah			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas	100%	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap	100%	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana Penunjang Operasional Kantor	100%	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa/Sarana Penunjang Operasional Kantor	100%	Menunjang
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dan Sarana Prasarana Kantor Yang Dibayarkan	100%	Menunjang

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja ini, dengan nilai A, dengan mengoptimalkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dan sumber pendanaan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

Kalau kita lihat dari segi dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), bila dilihat dari segi kuantitas masih kurang mendukung dalam pencapaian target Sasaran Strategis ini, oleh karena itu kami terus berupaya memaksimalkan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas/mutu SDM, selanjutnya dari segi kuantitas maupun kualitas dukungan SDM. Untuk itu kita juga berupaya dengan melakukan koordinasi dengan bidang terkait dalam hal ini Sekretariat yang ada dalam lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, agar menambahkan jumlah personil untuk mendukung pencapaian sasaran ini.

3.2 Realisasi Anggaran

Tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh alokasi anggaran APBD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sebesar Rp. 4.735.102.141,- terealisasi sebesar Rp. 4.507.201.524,- atau 95,19%.

Pagu anggaran tersebut bersumber dari APBD Kota Payakumbuh. Gambaran Realisasi Anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan Kinerja Organisasi sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.22
Akuntabilitas Keuangan Tahun 2022

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
			Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	210.583.010,-	193.582.881,-	91,93
		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi	210.583.010,-	193.582.881,-	91,93

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
			Pagu	Realisasi	%
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	210.583.010,-	193.582.881,-	91,93
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	119.549.772,-	115.539.182,-	96,65
		Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	32.411.440,-	31.308.550,-	96,60
		Perluasan Kesempatan Kerja	32.411.440,-	31.308.550,-	96,60
		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	87.138.332,-	84.230.632,-	96,66
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	87.138.332,-	84.230.632,-	96,66
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	20.318.300,-	18.964.680,-	93,34
		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	20.318.300,-	18.964.680,-	93,34
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.238.900,-	15.153.280,-	93,31
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.079.400,-	3.811.400,-	93,43
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.069.863.440,-	1.019.053.702,-	95,25
		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.069.863.440,-	1.019.053.702,-	95,25
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	367.603.450,-	333.545.078,-	90,74
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan	30.108.415,-	29.572.080,-	98,22

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
			Pagu	Realisasi	%
		Sumber Daya Industri			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	535.312.899,-	521.108.928,-	97,35
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	136.838.676,-	134.827.616,-	98,53
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	61.129.770,-	60.574.690,-	99,09
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	61.129.770,-	60.574.690,-	99,09
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	61.129.770,-	60.574.690,-	99,09
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.253.657.849,-	3.099.486.389,-	95,26
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.903.670,-	99.270.490,-	99,37
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.065.330,-	46.617.230,-	99,05
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.838.340,-	52.653.260,-	99,65
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.372.480.665,-	2.243.928.282,-	94,58
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.372.480.665,-	2.243.928.282,-	94,58
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.095.080,-	9.880.000,-	97,87

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
			Pagu	Realisasi	%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.095.080,-	9.880.000,-	97,87
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	403.923.050,-	403.540.129,-	99,91
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4.003.300,-	4.003.300,-	100
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.848.960,-	48.704.060,-	99,70
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.863.230,-	27.821.330,-	99,85
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.004.560,-	6.004.560,-	100
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000,-	13.387.900,-	99,17
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.703.000,-	303.618.979,-	99,97
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.026.784,-	238.993.686,-	90,86
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	570.000,-	570.000,-	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.179.664,-	120.876.918,-	83,84
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.277.120,-	117.546.768,-	99,38
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.228.600,-	103.873.802,-	99,66
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000,-	39.072.913,-	99,70
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.400.000,-	59.207.289,-	99,68
		Pemeliharaan Mebel	5.638.600,-	5.593.600,-	99,20

Anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh terdiri dari 6 Program, 12 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan dan dibagi menjadi 2 urusan yaitu :

1. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada Urusan Wajib Tenaga Kerja terdapat 4 Program, 10 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan. Dari 4 Program tersebut, 1 Program Sekretariat dan 3 Program Bidang Tenaga Kerja.

Sedangkan dari 21 Sub Kegiatan pada Urusan Wajib Tenaga Kerja, terdiri dari 16 Sub Kegiatan Sekretariat dan 5 Sub Kegiatan Bidang Tenaga Kerja.

Pagu anggaran tersebut sumber dananya dari APBD Kota Payakumbuh. Dukungan dana untuk Urusan Wajib Tenaga Kerja sebesar Rp. 3.604.108.931,- sedangkan realisasi anggaran untuk Urusan Wajib Tenaga Kerja sebesar Rp. 3.427.573.132,- atau 95,10%.

Dari 21 Sub Kegiatan tersebut diatas semua Sub Kegiatan yang penyerapannya diatas 80%.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dari Urusan Wajib Tenaga Kerja bila dilihat dari rata-rata penyerapan per kegiatan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

2. Urusan Pilihan Perindustrian

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada Urusan Pilihan Perindustrian terdapat 2 Program, 2 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.130.993.210,-. Pagu anggaran tersebut bersumber dari APBD Kota Payakumbuh. Realisasi anggaran untuk Urusan Pilihan Perindustrian sebesar Rp. 1.079.628.392,- atau 95,46%.

Dari 5 Sub Kegiatan tersebut diatas semua Sub Kegiatan yang penyerapannya diatas 90%.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dari Urusan Pilihan Perindustrian bila dilihat dari rata-rata penyerapan per kegiatan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Tabel 3.23

Akuntabilitas Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	- Jumlah Tenaga Kerja Yang Berwirausaha	50 org	99 org	198%
			- Jumlah Tenaga Kerja Yang Diserap Wirausaha	75 org	75 org	100%
		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja Yang Dilatih dan Bersertifikat	48 org	48 org	100%
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan	48 org	48 org	100%
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	261 org	297 org	113,79%
		Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	20 org	20 org	100%
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapat perluasan kesempatan kerja	20 org	20 org	100%
		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Di Bursa Kerja Online	250 org	587 org	234,8%
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah honorarium THL Pelayanan IPK yang dibayarkan	3 org	3 org	100%
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	3 kasus	1 kasus	33,33%
		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	1 kasus	1 kasus	100%

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan peserta sosialisasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	50 perusahaan	50 perusahaan	100%
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perselisihan antara pekerja dengan pemberi kerja yang difasilitasi	1 kasus	1 kasus	100%
2	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	- Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna	3,35%	0,52%	15,52%
			- Persentase Sentra/Klaster Industri Yang Tertata	60%	75%	125%
		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penerapan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Yang Disusun	5 dokumen	5 dokumen	100%
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	- Jumlah buku kiprah Dekranasda yang disusun - Jumlah buku tenun yang disusun	- 1 Buku - 1 Buku	- 1 Buku - 1 Buku	100%
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah peserta pelatihan/workshop penguatan peralatan produksi bagi IKM melalui TTG	10 IKM	10 IKM	100%
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Oprasional Sentra IKM Rendang (UPTD P3R)	13 org	13 org	100%

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- Jumlah honorarium THL yang dibayarkan - Jumlah IKM yang mengikuti pembinaan keterkaitan produksi industri hulu ke hilir	- 4 org THL - 15 IKM	- 4 org THL - 15 IKM	100%
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	- Persentase Industri Yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk	2,75%	8,40%	305,55%
			- Jumlah Produk Industri Yang Mendapat Sertifikat	1 buah	6 buah	600%
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Industri Yang Difasilitasi	6 IKM	6 IKM	100%
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah peningkatan daya saing melalui pelaksanaan sertifikasi, legalitas dan jaminan mutu produk dengan kegiatan jumlah fasilitasi sertifikat halal	6 IKM	6 IKM	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	90	91,27	101,41%
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan	80%	100%	100%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah dokumen SOP, Renja,	4 dokumen	4 dokumen	100%

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
		Daerah	Perubahan Renja dan IKM OPD yang disusun			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang disusun - Jumlah koordinasi yang dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 dokumen - 7 kali 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 dokumen - 7 kali 	100
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas	80%	100%	100
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan yang dibayarkan - Jumlah honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa yang dibayarkan - Jumlah jasa pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan 	<ul style="list-style-type: none"> - 19 org - 1 org - 19 org 	<ul style="list-style-type: none"> - 19 org - 1 org - 19 org 	100
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap	100%	100%	100
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang diadakan	19 set	19 set	100
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana Penunjang Operasional Kantor	80%	90%	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang dibeli	7 jenis	7 jenis	100%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang dibeli	86 jenis	86 jenis	100%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan	9 jenis	9 jenis	100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
			penggunaan yang dibeli			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli	1016 koran	1016 koran	100%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu yang disediakan	780 porsi	780 porsi	100%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	50 kali	50 kali	100%
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa/Sarana Penunjang Operasional Kantor	80%	80%	100%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah benda pos yang dibeli - Jumlah buku cek yang dibeli	- 57 lembar - 0	- 57 lembar - 0	- 100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah jasa komunikasi yang dibayarkan - Jumlah taguhan listrik yang dibayarkan	- 1 rek - 1 rek	- 1 rek - 1rek	100%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah honorarium THL yang dibayarkan - Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan	- 4 org - 400 porsi	- 4 org - 400 porsi	- 100% - 100%
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dan Sarana Prasarana Kantor Yang Dibayarkan	80%	100%	100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan	1 unit	1 unit	100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan dinas operasional	12 unit	12 unit	100%

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
		Lapangan	atau lapangan yang dibayarkan			
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel yang dibayarkan	48 buah	48 buah	100%

1. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada Urusan Wajib Tenaga Kerja terdapat 4 Program, 9 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan. Anggaran dari program dan kegiatan tersebut sumber dananya berasal dari APBD Kota Payakumbuh.

Dari 21 Sub Kegiatan tersebut diatas semua Sub Kegiatan yang realisasi kinerjanya diatas 80%. Adapun Program yang ada pada Bidang Tenaga Kerja ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerjadengan Indikator Kinerja Program :

✚ Jumlah Tenaga Kerja Yang Berwirausaha

✚ Jumlah Tenaga Kerja Yang Diserap Wirausaha

Indikator program ini menargetkan untuk jumlah tenaga kerja yang berwirausaha sebanyak 50 orang dengan realisasi sebanyak 99 orang dengan nilai capaian Indikator Kinerja Program sebesar 198%. Sedangkan untuk jumlah tenaga kerja yang diserap wirausaha ditargetkan sebanyak 75 orang terealisasi sebanyak 75 orang, maka nilai capaian Indikator Kinerja Program sebesar 100%. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan Indikator Kinerja Program :

✚ Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan

Indikator program ini menargetkan untuk jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 261 orang, terealisasi sebanyak 297 orang, maka nilai capaian Indikator Kinerja Program sebesar 113,79%, hal ini disebabkan banyak penempatan tenaga kerja di Kota Payakumbuh.

- b. Program Hubungan Industrial dengan Indikator Kinerja Program :

✚ Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan

Indikator program ini menargetkan untuk kasus yang diselesaikan sebanyak 3 kasus, terealisasi sebanyak 1 kasus, maka nilai capaian Indikator Kinerja Program sebesar 100,00%, hal ini disebabkan kasus yang masuk hanya 1 kasus.

2. Urusan Pilihan Perindustrian

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada Urusan Pilihan Perindustrian terdapat 2 Program, 2 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan. Anggaran dari program dan kegiatan tersebut sumber dananya berasal dari APBD Kota Payakumbuh.

Dari 5 Sub Kegiatan tersebut diatas semua Sub Kegiatan yang realisasi kinerjanya diatas 90%.

Adapun Program yang ada pada Bidang Tenaga kerja ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :

3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan Indikator Kinerja Program :

- ✚ Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna
- ✚ Persentase Sentra/Klaster Industri Yang Tertata

Indikator program ini menargetkan untuk persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna sebesar 3,35% dengan realisasi sebesar 0,52% dengan nilai capaian Indikator Kinerja Program sebesar 15,52%. Sedangkan untuk persentase sentra/klaster industri yang tertata sebesar 60% dengan realisasi sebesar 75%, maka nilai capaian Indikator Kinerja Program sebesar 125%.

4. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja Program :

- ✚ Persentase Industri Yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk
- ✚ Jumlah Produk Industri Yang Mendapat Sertifikat Produk

Indikator program ini menargetkan untuk persentase industri yang menerapkan standarisasi mutu produk sebesar 2,75%, dengan realisasi sebesar 8,40%, maka nilai capaian Indikator Kinerja Program sebesar 305,55%. Sedangkan untuk jumlah produk industri yang mendapat sertifikat produk sebanyak 1

buah dengan realisasi sebanyak 6 buah, maka nilai capaian Indikator Kinerja Program sebesar 600%.

3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, tapi untuk Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh belum memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai.

Tetapi untuk UPTD Sentra Rendang telah memiliki 3 sertifikat produk yaitu :

1. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)



2. Sertifikat SPT SNI



3. Sertifikat ISO 22000



BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2022 merupakan tahun ke limadari Perubahan Renstra Tahun 2017-2022. Hasil laporan dapat disimpulkan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mempunyai 3 sasaran Indikator Kinerja Utama dengan 3 indikator kinerja yang dipilih sebagai tolak ukur. Berdasarkan rencana target yang sudah dirumuskan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 jumlah 3 indikator sasaran telah dilaksanakan dengan hasil predikat sangat baik dengan tingkat ketercapaian ≥ 100 .

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 4.735.102.141,- realisasi anggaran mencapai Rp. 4.507.201.524,- atau 95,19%.

4.2. Permasalahan

Permasalahan atau kendala yang dihadapi pada Tahun 2022 berkaitan dengan :

Urusan Ketenagakerjaan

5. Kualitas pekerja yang relatif masih rendah, ini disebabkan karena rendahnya pendidikan atau masih ada keterampilan yang dimiliki belum sesuai dengan bidang pekerjaan yang sedang membutuhkan banyak tenaga kerja
6. Masih rendahnya produktifitas tenaga kerja, karena masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki
7. Belum optimalnya penempatan dan penyerapan tenaga kerja sektor informal/usuha rumahan
8. Belum optimalnya perusahaan yang memenuhi ketentuan menyusun Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
9. Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja atau pengupahan

10. Belum optimalnya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan
11. Belum optimalnya jaminan sosial tenaga kerja
12. Belum optimalnya peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan

Urusan Perindustrian

1. Produktifitas IKM menurun akibat dampak covid-19 dan kenaikan harga BBM yang mempengaruhi menurunnya permintaan pasar atas produk IKM
2. Kualitas produksi kurang bersaing
3. Sistem manajemen yang kurang baik dalam mengelola usaha
4. Kurangnya bahan baku yang impor akibat pandemic covid-19 dan kenaikan harga BBM, sehingga bahanbaku menjadi mahal dan langka yang berpengaruh pada produktifitas IKM
5. Belum berkembangnya packing/kemasan industri makanan
6. Kurang berkembangnya teknologi permesinan di dalam negeri yang mendukung produk IKM

4.3 Tindak Lanjut

Langkah-langkah untuk meningkatkan perbaikan lebih lanjut dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :

Urusan Tenaga Kerja

1. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan dengan Upskilling dan Reskilling dan pemagangan
2. Meningkatkan sertifikasi tenaga kerja dan akreditasi lembaga pelatihan kerja
3. Meningkatkan pelayanan publik melalui sistem informasi penempatan tenaga kerja Bursa Kerja Online melalui aplikasi elektronik untuk memperluas penempatan tenaga kerja
4. Melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan
5. Mengoptimalkan kegiatan padat karya untuk mengurangi pengangguran
6. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
7. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dengan peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk

8. Melakukan pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan norma keselamatan kerja dan perlindungan hukum tenaga kerja dalam dan luar negeri
9. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui pembinaan dan pemantauan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta norma kerja

Urusan Perindustrian

1. Meningkatkan pemasaran produk unggulan
2. Meningkatkan kualitas pengrajin IKM
3. Meningkatkan pengembangan packing/kemasan industri makanan
4. Meningkatkan sarana dan kualitas SDM IKM
5. Meningkatkan jumlah pasar dalam kondisi baik

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan evaluasi kinerja yang akan datang.



Payakumbuh, Desember 2022
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh

FUNIDA FATWA, S.Sos,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670601 198809 2 001